

Strategi Pemerintah Sri Lanka dalam Menangani Kelompok Liberation Tigers of Tamil Eelam(LTTE)

Nyoman End Triana Gayatri ¹⁾, Ni Wayan Rainy Priadarsini²⁾,
A.A Bagus Surya Widya Nugraha^{3)1,2,3)}
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Udayana

Email: endtrianagayatri@gmail.com¹, rainypriadarsini@yahoo.com², aabasuwinu@gmail.com³

ABSTRACT

This research was conducted using qualitative research method with the aim to be able to answer the research question related to Sri Lanka Government's strategy in handling Liberation Tigers of Tamil Eelam (LTTE) group. This research attempts to elaborate on the strategies adopted by the Sri Lankan government in the face of a strong LTTE group. Although several attempts and negotiations have been carried out before but it never reached a final point. The results of this research are descriptions of the strategies implemented by the Government of Sri Lanka that successfully brought the Government to victory over the LTTE group. The strategy is a new strategy of the Sri Lankan Government that applied during the period of the Eelam War IV (2006-2009) which is a combination of various strategies such as military strategy, politics, diplomacy and social and economic or known as the grand strategy.

Keywords: Sri Lankan Government, LTTE, Strategy, Grand Strategy

1. PENDAHULUAN

Perang Sipil Sri Lanka yang dikenal dengan Perang Eelam antara Pemerintah Sri Lanka dan kelompok separatis *Liberation Tigers of Tamil Eelam* atau Macan Tamil (selanjutnya disebut LTTE) selama 26 tahun berhasil diakhiri pada tahun 2009. Akhir dari Perang Sipil terjadi setelah Pemerintah Sri Lanka memperoleh kemenangan atas LTTE. Konflik terbuka antara keduanya sebenarnya telah muncul sejak masa pendudukan kolonial Inggris ketika Sri Lanka masih bernama *Ceylon* (Sukarja, 2010). Namun situasi menjadi lebih buruk sejak kelompok militan LTTE melakukan penyerangan terhadap Pemerintah Sri Lanka sebagai upaya mereka untuk berpisah dan mendirikan Negara Tamil Merdeka yang dikenal dengan nama *Tamil Eelam*.

Konflik awalnya terjadi dengan melibatkan dua etnis utama yang mendiami Sri Lanka yaitu Sinhala yang merupakan etnis mayoritas memeluk agama Budha dan Tamil yang merupakan etnis minoritas yang memeluk agama Hindu. Kemunculan kebijakan diskriminatif seperti *Ceylon Citizenship Act* di tahun 1949 serta *Sinhala Only Act* di tahun 1956 semakin meningkatkan eskalasi konflik di antara dua etnis. Poin yang tercantum dalam kebijakan *Ceylon Citizenship Act* memunculkan adanya pembenaran bagi Pemerintah Ceylon (Sri Lanka) untuk mengembalikan 300.000 penduduk Tamil ke India dan sebanyak 700.000 warga Tamil dibuat tidak memiliki kewarganegaraan (*Stateless*) (Pepera, 1999).

Sedangkan kebijakan *Sinhala Only Act* yang disahkan oleh Perdana Menteri S.W.R.D Bandaranaike merupakan kebijakan yang menjadi dasardijadikannya Bahasa Sinhala sebagai bahasa nasional *Ceylon* menggantikan Bahasa Inggris. Hal ini membuat banyak penduduk Tamil menjadi pengangguran dan jatuh miskin karena tidak menguasai bahasa Sinhala dalam bidang pekerjaan.

Adanya diskriminasi ini kemudian menjadi awal mula munculnya gerakan separatis *Liberation Tigers of Tamil Eelam*(LTTE) yang dibentuk oleh ekstrimis Tamil. Kelompok ini melakukan penyerangan untuk pertama kalinya di tahun 1983 dan menewaskan 13 tentara Sri Lanka. Peristiwa ini kemudian menimbulkan kerusuhan anti Tamil di ibu kota Kolombo yang menewaskan ratusan orang Tamil dan menjadi awal mula terjadinya perang sipil di Sri Lanka yang dikenal dengan nama Perang Eelam yang kemudian diikuti dengan adanya Perang Eelam II di tahun 1990, Perang Eelam III pada periode tahun 1995 –2000 dan perang Eelam IV periode tahun 2006-2009 (Mehta,2010).

Selama 23 tahun pertama, berbagai upaya dilakukan oleh pemerintah Sri Lanka untuk mengakhiri perang saudara ini. Upaya mediasi dan perundingan damai menjadi fokus utama penyelesaian konflik yang dilakukan Pemerintah Sri Lanka di samping penggunaan militer dalam skala sempit untuk menekan pasukan LTTE. Seiring dengan gagalnya upaya perundingan karena penolakan dari kelompok LTTE, Pemerintah Sri Lanka pun mengubah strategi untuk menghadapi LTTE dari perundingan dengan jalan damai menjadi berkeinginan untuk

melakukan penyerangan total (*total offensive*) ke markas kelompok LTTE dan penyerangan puncak terjadi di tahun 2009. Penyerangan ini menewaskan Velupillai Prabhakaran yang merupakan pemimpin kelompok LTTE dan menandakan kemenangan bagi pihak Pemerintah Sri Lanka.

Kemenangan Pemerintah Sri Lanka terhadap LTTE terjadi bukan semata – mata dikarenakan oleh keberhasilan dalam penerapan strategi militer dengan melakukan penyerangan total terhadap LTTE saja, tetapi juga dikarenakan oleh adanya perubahan strategi yang dilakukan Pemerintah Sri Lanka sejak tahun 2006. Strategi baru pemerintah Sri Lanka dirancang dengan melibatkan instrumen – instrumen lainnya sebagai satu – kesatuan strategi untuk mendukung strategi militer yang dijalankan Tentara Nasional Sri Lanka. Tulisan ini kemudian bermaksud menggambarkan bagaimana strategi baru yang digunakan pemerintah Sri Lanka tersebut berhasil dalam menangani kelompok LTTE di tahun 2009 setelah sebelumnya telah beberapa kali mengalami kegagalan dalam perundingan.

2. KAJIAN PUSTAKA

Penelitian ini menggunakan dua literatur yang berkaitan dengan strategi yang digunakan untuk mengakhiri perang sipil. Literatur pertama merupakan tulisan yang berjudul *Civil-Military Relations and Negotiated Settlements in Civil Wars: Explaining the Failure and Success of Post-Suharto Peace Processes in Aceh* (2011) oleh Evan A. Laksmana dan Terence Lee. Melalui Tulisannya Laksmana dan Lee (2011)

mempertanyakan mengapa dan dalam kondisi seperti apa proses perdamaian dalam perang sipil separatis menghasilkan penyelesaian yang berhasil dinegosiasikan. Dengan mengambil studi kasus konflik militer antara Pemerintah Indonesia dengan kelompok separatis yang tergabung dalam *Gerakan Aceh Merdeka* (GAM) yang bereskalasi di akhir rezim Soeharto tahun 1998, literatur ini kemudian memaparkan bahwa telah dilakukan beberapa upaya untuk mengakhiri konflik antara Pemerintah Indonesia dan GAM.

Dari upaya – upaya yang pernah dilakukan beberapa kali mengalami kegagalan, namun pada akhirnya kedua belah pihak bersepakat untuk mengadakan perundingan kembali. Menurut Laksmana & Lee (2011) keberhasilan Aceh menimbulkan pertanyaan teoritis dan empiris yang penting untuk studi perang sipil: Mengapa Kesepakatan Helsinki 2005 berhasil sementara inisiatif perdamaian yang dilakukan sebelumnya gagal?

Lebih lanjut dipaparkan bahwa keberhasilan dalam mengakhiri perang sipil sangat dipengaruhi oleh hubungan baik yang terbentuk antara sipil dan militer. Hubungan sipil dan militer dipandang baik atau sesuai ketika warga sipil dapat memulai, memutuskan dan memantau kebijakan strategis terkait dengan operasi militer yang sedang berlangsung ataupun dalam upaya perdamaian yang dilakukan. Sementara di sisi lain militer menentukan kebijakan institusional dan operasional yang terbaik untuk mengimplementasikan keputusan pemerintah.

Alan. J. Kuperman melalui tulisannya yang berjudul *Liberia: How Diplomacy Helped End a 13 Year Civil War* (2015), memaparkan mengenai kecerdasan dalam penggunaan diplomasi memiliki peran yang sama pentingnya dengan intervensi militer dalam berakhirnya 13 tahun perang sipil di Liberia jika komunitas internasional bersedia melibatkan diri dalam menjalankan doktrin R2P (*Responsibility to Protect*).

Inti sari dari tulisan ini adalah penjelasan mengenai bagaimana sebuah penggabungan dari diplomasi dan intervensi militer dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan berhasil mengakhiri perang sipil Liberia yang telah berlangsung selama 13 tahun. Kuperman juga menjelaskan mengapa usaha ini berbeda dari usaha – usaha yang sebelumnya gagal diterapkan untuk melindungi warga sipil pada perang sipil lainnya.

Menurut Kuperman (2015) kesuksesan diplomasi yang dilakukan di Liberia terjadi disebabkan oleh dua alasan utama yakni, pertama tidak seperti konflik lainnya yang belakangan terjadi, masyarakat atau komunitas internasional menolak untuk menghargai usaha kelompok pemberontak dalam menekan tindakan pemerintah yang menyebabkan terjadinya darurat kemanusiaan. Sebagai gantinya para diplomat mengancam kelompok pemberontak dengan tuntutan - tuntutan kecuali mereka berhenti melakukan pemberontakan dan penyerangan. Pengerahan pasukan perdamaian juga dilakukan untuk mencegah penyebaran pergerakan dari kelompok pemberontak, hal ini kemudian berhasil menjadi

upaya intervensi humaniter yang berpengaruh pada ruang gerak kelompok pemberontak untuk memicu konflik – konflik baru.

Alasan kedua adalah masyarakat Internasional menahan diri untuk terlibat dalam tuntutan penyerahan diri Presiden Liberia atau tuntutan pengadaan pemilu secara cepat. Lebih jauh pihak negosiator menjanjikan suaka politik bagi Presiden Liberia dan pembagian kekuasaan dalam lingkaran politiknya, dengan demikian hal ini dapat mencegah serangan balasan yang mengandung unsur kekerasan dalam rezim pemerintahan.

Kedua tulisan yang digunakan sebagai kajian pustaka memiliki keterkaitan terhadap penelitian penulis dimana kerangka berpikir yang digunakan berusaha memaparkan mengenai strategi yang digunakan dalam penyelesaian suatu perang sipil.

Sama seperti kedua literatur yang menjadi kajian pustaka bahwasanya penyelesaian perang sipil dilakukan dengan menerapkan strategi – strategi tertentu. Seperti penguatan hubungan Sipil dan militer dalam kasus GAM ataupun penggunaan diplomasi dalam Perang Sipil Liberia yang memperlihatkan bahwa mengakhiri perang sipil tidak semata – mata dilakukan dengan penerapan strategi militer saja karena diperlukan pendekatan – pendekatan strategi lainnya untuk mendukung keberhasilan dalam penerapan strategi utama.

Penelitian penulis juga memaparkan mengenai strategi Pemerintah Sri Lanka dalam menangani kelompok LTTE namun tidak hanya mengacu pada satu strategi tertentu melainkan dilihat secara menyeluruh melibatkan hubungan

sipil dan militer, diplomasi, ekonomi dan politik sebagai strategi penyelesaian perang sipil di Sri Lanka. Sehingga penelitian ini akan lebih luas dari segi penjelasan strategi dibandingkan dengan literatur yang digunakan sebagai kajian pustaka.

3. METODELOGI PENELITIAN

Jenis penelitian ini dapat digolongkan ke dalam jenis penelitian deskriptif kualitatif. Metode penelitian kualitatif bertujuan untuk menggambarkan, meringkaskan berbagai kondisi, berbagai situasi atau berbagai fenomena realitas sosial yang ada di masyarakat yang menjadi objek penelitian dan berupaya menarik realitas itu ke permukaan sebagai suatu ciri, karakter, sifat, model, tanda atau gambaran tentang kondisi situasi ataupun fenomena tertentu (Bungin, 2007). Maka dari itu penelitian ini nantinya akan menggambarkan bagaimana strategi pemerintah Sri Lanka dalam menanggulangi kelompok *Liberation Tigers of Tamil Eelam* (LTTE).

Adapun Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu sumber data sekunder. Sumber data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung atau melalui media perantara biasanya berbentuk bukti, catatan atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip atau data dokumenter yang telah dipublikasikan maupun yang tidak atau belum dipublikasikan.

Unit analisis adalah aspek dalam penelitian yang perilakunya hendak dijelaskan atau dideskripsikan (Mas'ood, 1990). Unit analisis dalam penelitian ini tergolong ke dalam unit

analisis negara karena unit yang diteliti dan hendak dijelaskan penulis dalam penelitian ini merupakan perilaku dari negara lebih luas dari unit individu, kelompok, organisasi dan lain sebagainya. Negara dalam penelitian ini direpresentasikan oleh Pemerintah Sri Lanka. Lebih lanjut penelitian ini akan mendeskripsikan bagaimana perilaku pemerintah Sri Lanka dalam menangani kelompok LTTE.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah berdasarkan studi kepustakaan dan dokumentasi. Teknik pengumpulan data berupa studi pustaka dilakukan dengan cara mencari data maupun informasi dari buku, jurnal dan lainnya. Sedangkan, dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang digunakan untuk menelusuri data historis seperti otobiografi, surat – surat pribadi, buku – buku catatan harian, kliping, dokumen pemerintah maupun swasta, data di server ataupun flashdisk, data tersimpan di website dan lain sebagainya (Bungin, 2007). Data yang dihimpun merupakan data sekunder melalui metode studi kepustakaan dan dokumentasi yang kemudian di olah untuk mendeskripsikan bagaimana strategi pemerintah Sri lanka dalam menanggulangi kelompok LTTE (*Liberation of Tamil Tiger Eelam*).

Terkait teknik analisis data dalam penelitian ini, Penulis menggunakan teknik analisis data kualitatif dengan data berupa kata – kata bukan angka atau perhitungan. Menurut Miles & Huberman,teknis analisis data ini dilakukan dengan cara mengatur secara sistematis data kepustakaan yang di dapat, kemudian

memformulasikan data tersebut secara deskriptif dilanjutkan dengan memproses data dengan tahapan reduksi data, selanjutnya menyajikan data, dan menyimpulkan (Silalahi,2012)

Teknik penyajian data dalam penelitian ini menggunakan data – data sekunder yang telah dikumpulkan dan dianalisa menggunakan analisis isi yang akan disajikan dalam bentuk narasi maupun tabel. Hasil yang diperoleh nantinya akan diinterpretasikan, kemudian disajikan dalam bentuk naratif dalam sebuah paragraf. Penulis nantinya akan menjabarkan data-data yang didapat terkait strategi pemerintah Sri Lanka dalam menanggulangi kelompok LTTE secara naratif.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Faktor Penyebab Perang Sipil di Sri Lanka

Dalam buku *Greed and Grievance in Civil War* yang ditulis oleh Paul Collier dan Anke Hoeffler (2002) pada bab *On the Causes of Civil War* dipaparkan sebuah *framework* mengenai penyebab terjadinya Perang Sipil secara umum. Disebutkan bahwa konflik yang berujung pada perang sipil sangat dipengaruhi oleh sejarah yang dimiliki suatu negara. Ada bukti kuat bahwa negara-negara yang pernah mengalami perang sipil atau perang saudara di masa lalu memiliki kemungkinan lebih besar untuk mengalami hal serupa di masa akan datang.

Collier & Hoeffler (2002) menemukan bahwa di sebagian besar negara, perang sipil akan kembali berlangsung dalam selang waktu

satu dekade. Tetapi mereka belum dapat membedakan apakah perang sipil yang terjadi adalah perang sipil yang sama seperti sebelumnya dalam artian perang tersebut terjadi untuk memperjuangkan satu isu yang sama dengan kelompok perang yang sama. Mereka hanya menganalisa bahwa perang sipil terjadi di negara yang sama. Disamping faktor sejarah, penyebab perang sipil juga dipengaruhi oleh faktor pendapatan (*income*). Hubungan antara pendapatan dan perang sipil telah diteliti dalam berbagai aspek dengan menganalisa korelasi antara tingkat pendapatan, pertumbuhan, struktur dan distribusi pendapatan dengan terjadinya perang sipil. Tingkat pendapatan, pertumbuhan ekonomi yang rendah serta distribusi pendapatan yang tidak merata dapat berujung pada terjadinya konflik antar golongan dalam suatu negara.

Penyebab konflik berskala besar yang paling banyak dipaparkan adalah adanya perbedaan etnisitas, agama dan kelas. Karena sebagian besar penelitian empiris telah dilakukan mengenai dampak etnisitas terhadap risiko perang sipil dan ditemukan bahwa sejak PD II, 57% perang sipil yang terjadi disebabkan oleh adanya perbedaan etnisitas. Ditambahkan pula bahwa sistem politik yang tidak stabil juga dapat mempengaruhi terjadinya Perang Sipil, begitu pula dengan demografi dan geografi juga dapat menjadi faktor penyebab Perang Sipil.

Menurut Collier dan Hoeffler (2002) dari segi demografi, ukuran sebuah negara mungkin penting karena negara-negara yang lebih besar dapat berarti memiliki lebih banyak kelompok berbeda yang tinggal di satu wilayah dengan

memiliki jarak tinggal yang jauh antar etnis. Hal ini membuat pemerintah harus bisa melakukan kontrol dengan perbatasan internasional untuk mengawasi wilayah tempat tinggal etnis – etnis yang tersebar dan jauh dari pusat pemerintahan. Ditambahkan pula bahwa negara dengan populasi yang lebih tersebar lebih berisiko untuk berperang. Dari segi geografi, beberapa karakteristik geografi tertentu juga cenderung mendukung adanya pemberontakan seperti misalnya daerah pegunungan dan hutan yang sulit untuk diawasi.

Berkaitan dengan kasus Perang Sipil Sri Lanka, Sehar Musthaq dalam jurnalnya yang berjudul *Identity Conflict in Sri Lanka: A Case of Tamil Tigers* tahun 2012 memaparkan secara lebih spesifik mengenai faktor penyebab terjadinya perang sipil di Sri Lanka. Menurut Musthaq terdapat tiga faktor utama yang menyebabkan terjadinya konflik etnis yang berujung pada lahirnya LTTE dan berujung pada terjadinya Perang sipil di Sri Lanka yang dikenal dengan Perang Eelam. Ketiga faktor tersebut yakni faktor internal, eksternal dan katalis.

Hal – hal yang berkaitan dengan perbedaan kelas, agama serta etnisitas yang menjadi penyebab terjadinya Perang Sipil di Sri Lanka tergolong dalam faktor internal terjadinya Perang Sipil di Sri Lanka dikarenakan faktor tersebut memang berasal dari internal Negara Sri Lanka yang melibatkan dua etnis utama yakni Sinhala dan Tamil. Sedangkan hal – hal yang tergolong dalam faktor eksternal adalah dukungan negara – negara asing seperti India serta diaspora Tamil di luar negeri terhadap

keberadaan LTTE. Dukungan dilakukan melalui pemberian bantuan persenjataan, pelatihan dan dana dengan jumlah yang tidak sedikit untuk LTTE dapat menjalankan aksi – aksi militernya.

Faktor – faktor yang menimbulkan konflik dan membuatnya tidak dapat dihindari di sebut dengan katalis. Faktor yang memainkan peran utama pemicu konflik berawal dari adanya ketegangan antara etnis Tamil dan Sinhala sejak masa kolonialisme Inggris tetapi konflik ini menjadi lebih jelas pasca-kemerdekaan ketika kebijakan etnosentris pemerintah yang menjabat memicu konflik semakin berkembang. Seperti kebijakan *Sinhala Only Act* tahun 1956 dan Konstitusi etnosentris tahun 1972 yang mengakibatkan terjadinya penyerangan – penyerangan hingga memunculkan kerusuhan anti Tamil dimana aktivis Sinhala menyerang serta membakar bus yang membawa warga Tamil serta menghancurkan properti mereka.

Setelah kerusuhan tersebut pihak Tamil memutuskan untuk menuntut kemerdekaan dengan membentuk negara baru yakni Tamil Eelam bukan lagi menuntut pemberian otonomi seperti yang awalnya mereka inginkan (Zwier, 1998). Ketiga faktor inilah yang kemudian memicu terjadinya situasi konflik antara etnis Sinhala dan Tamil hingga berujung pada terjadinya Perang Eelam antara Pemerintah Sri Lanka dengan kelompok LTTE.

Baik dalam tulisan Collier dan Hoffler (2002) dan Analisa Musthaq (2012) permasalahan etnisitas adalah dua hal yang disebutkan sebagai penyebab konflik etnis. Sehingga sebagaimana pemaparan Collier dan Hoffler (2002) mengenai penyebab munculnya

konflik etnis, maka permasalahan yang berkaitan dengan etnisitas baik itu pembagian etnis dan agama, kebencian masa lamapu, diskriminasi kebudayaan seperti apa yang dijabarkan oleh Musthaq (2012) dapat dikatakan sebagai penyebab utama munculnya konflik. Hal ini kemudian berlanjut menjadi konflik antara Pemerintah Sri Lanka yang mayoritas diisi oleh etnis Sinhala dengan LTTE yang merupakan perpanjangan militer dari etnis Tamil.

4.2. Strategi Pemerintah Sri Lanka dalam menangani LTTE

Setelah di masa Perang Eelam I,II,III Pemerintah Sri Lanka berupaya untuk menghentikan konflik serta peperangan dengan jalan perundingan serta pemberlakuan operasi militer dalam skala sempit. Pemerintah Sri Lanka akhirnya merubah strategi untuk menghadapi LTTE karena tidak efektifnya upaya perundingan serta operasi ofensif yang dilakukan sebelumnya. Pemerintah Sri Lanka dapat dikatakan mengadopsi *Grand Strategy* sebagai strategi baru yang diterapkan dalam periode Perang Eelam IV. Paul Kennedy dalam *Grand Strategies in War and Peace* (1991) mendefinisikan konsep *grand strategy* sebagai kebijakan yang membutuhkan kemampuan pemimpin dalam menggunakan segala elemen yang ada baik secara militer maupun non – militer untuk pelestarian dan peningkatan jangka panjang suatu bangsa. *Grand strategy* dijalankan tidak hanya dengan penggunaan militer yang ketat tetapi juga menyertakan instrumen ekonomi, diplomatik, sosial, dan

instrumen politik dalam kebijakan nasional di dalamnya. Maka pengertian *grand strategy* akan lebih luas dari strategi.

Serupa dengan kasus Perang Sipil di Sri Lanka, pada tahun 2006 ketika Pemerintah Sri Lanka memutuskan untuk tidak melanjutkan upaya damai yang berfokus pada strategi militer yang sempit seperti yang pernah dilakukan sebelumnya. Pemerintah Sri Lanka kemudian menerapkan strategi yang melibatkan berbagai instrumen di dalamnya seperti ekonomi, diplomasi dan politik sehingga dapat dipahami dalam menanggulangi kelompok LTTE, pemerintah Sri Lanka tidak menggunakan strategi militer saja tetapi lebih luas daripada itu, pemerintah Sri Lanka mengadopsi *grand strategy*.

4.3. Strategi Militer Pemerintah Sri Lanka dalam menangani kelompok LTTE

Tahun 2006 terjadi perubahan strategi militer dari hanya operasi pembebasan menjadi *total offensive* atau penyerangan total dengan penggunaan militer dalam skala yang lebih luas. Di bawah kepemimpinan Presiden Rajapakse, komandan – komandan yang memiliki pengalaman ditempatkan untuk memimpin pasukan Sri Lanka. Dengan penerapan prinsip meritokrasi dibandingkan senioritas, mereka yang memiliki kemampuan lebih baik dipilih untuk memimpin seluruh angkatan tempur Sri Lanka baik pasukan darat (*Sri Lanka Army*), pasukan udara (*Sri Lanka Air Force*) dan juga pasukan Laut (*Sri Lanka Navy*). Tentara Sri Lanka menjalankan taktik RMA (*revolution military affair*) yang merupakan taktik baru

pemerintah Sri Lanka dengan menekankan kepada penggunaan metode gerilya dibandingkan dengan perang konvensional seperti yang pernah dilakukan saat operasi pembebasan dahulu. Hal ini dilakukan untuk mencounter taktik serupa yang dijalankan oleh LTTE.

Meski menitikberatkan pada taktik gerilya, skenario yang ingin dicapai oleh pasukan Sri Lanka adalah membuat LTTE terdesak dalam posisi bertahan dan kemudian pasukan Sri Lanka akan melakukan penyerangan melalui operasi militer secara terus – menerus (Mehta,2010).

Dalam posisi bertahan, LTTE akan semakin terjepit dan kehilangan kebebasan untuk melakukan maneuver dan pasukan Sri Lanka akan merebut kembali wilayah – wilayah serta garis pantai yang sebelumnya berada dalam kendali LTTE. Untuk mencapai tujuan tersebut strategi militer Sri Lanka menjadi berkembang dengan melibatkan penggabungan operasi darat, laut, udara, Unit SIOT (*Special Infantry Operation Training*) atau unit operasi infantri yang dilatih khusus serta *Special Task Forces* atau Satuan petugas khusus.

SIOT melakukan penyusupan jauh ke dalam garis depan pertahanan LTTE dan berhasil menyerang sasaran kepemimpinan militer LTTE. Sebelumnya, pasukan khusus hanya berani maju 6 sampai 8 km ke dalam hutan dari garis depan pertahanan namun sekarang SIOT masuk 50 sampai 60 km untuk melakukan operasi militer. Pasukan penembak jitu yang dikerahkan juga berhasil menjatuhkan banyak korban dari pihak LTTE. Taktik Gerilya

yang dijalankan sebagai operasi khusus dan rahasia juga berhasil menyingkirkan puluhan pemimpin senior LTTE.

Tentara Nasional Sri Lanka berupaya secara terus-menerus untuk mendominasi jalur komunikasi LTTE dengan melibatkan peran Intelijen. Selain itu, pasukan Sri Lanka memainkan peran penting dengan mengorientasikan pendekatannya untuk mengalahkan *Sea Tigers* yang merupakan divisi maritim LTTE yang kuat. Konsep "Perahu Kecil" diperkenalkan pada tahun 2006, di mana ratusan perahu patroli laut berkecepatan tinggi yang diproduksi dengan cepat dan inklusif mulai diarahkan untuk melawan ancaman yang ditimbulkan oleh taktik - taktik bunuh diri *Sea tigers*. Oleh karena itu, pasukan angkatan laut Sri Lanka berhasil mendominasi perairan di pesisir Sri Lanka yang menyebabkan kerugian besar yang dihadapi oleh LTTE.

Pada tahun 2006 ada 21 pertarungan antara Tentara Nasional Sri Lanka dengan *Sea Tigers*. Intensitas pertarungan mengalami pengurangan menjadi hanya 11 pertarungan di tahun 2007 serta hanya menyisakan 2 pertarungan di tahun 2008. Keberhasilan penerapan strategi militer ini terjadi karena didukung oleh peningkatan baik jumlah pasukan yang tergabung dalam SIOT yang di latih secara khusus serta peningkatan kuantitas serta kualitas alutsista. Anggaran pertahanan untuk tahun 2007/2008 meningkat sebanyak 45% dari tahun 2006/2007 dan jumlah tantara juga mengalami peningkatan dari 50.000 menjadi 168.000 di tahun 2008 (Lunn,2009).

Pemerintah Sri Lanka juga menjalankan operasi militer di tiga wilayah yang menjadi markas LTTE yakni wilayah Timur (*The Eastern Offensive*), wilayah Utara (*TheNorthern Offensive*) serta *The Last Battle* yang terjadi di wilayah *New Fire Zone (NFZ)* sebagaimana dengan yang dijabarkan oleh Ashok Mehta (2010) dalam *Sri Lanka's Ethnic Conflict: How Eelam War IV was Won*. Perubahan taktik, penambahan pasukan dan persenjataan serta berbagai macam bentuk operasi militer yang dilakukan berhasil membawa Pemerintah Sri Lanka mencapai keberhasilan di bidang militer atas LTTE yang selama ini menyulitkan Tentara Nasional Sri Lanka.

4.4 Strategi Politik Pemerintah Sri Lanka dalam menangani kelompok LTTE

Pasca perang usai Pemerintah Sri Lanka menerapkan beberapa upaya akan kebutuhan politik dan reformasi konstitusional untuk memperoleh dukungan domestik dari masyarakat di masa perang serta mengatasi kemunculan kembali konflik serupa pasca perang usai. Dengan keberhasilan Pemerintah Sri Lanka memperoleh kemenangan militer, pemerintah kemudian mengalihkan perhatiannya untuk membangun pengaturan otonomi di wilayah Utara dan Timur Sri Lanka. Pengaturan otonomi merupakan hal yang awalnya dituntut oleh etnis Tamil sebelum etnis Tamil yang tergabung dengan LTTE menginginkan berpisah dari Sri Lanka dan mendirikan negara Tamil Eelam.

Pembicaraan mengenai pemberian otonomi bagi etnis Tamil sebenarnya menjadi

salah satu upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Sri Lanka untuk mengakhiri Perang Eelam secara damai. Namun, saat itu LTTE menolak tawaran politik tersebut dan tetap menginginkan berpisah kemudian membentuk Negara Tamil Eelam. Tetapi, pasca perang berakhir pemberian otonomi menjadi salah satu kebijakan politik yang ditawarkan Pemerintah Sri Lanka yang membuat warga Tamil di bagian Utara dan Timur mendukung rencana pemerintah tersebut.

4.5 Strategi Diplomasi Pemerintah Sri Lanka

Fungsi utama dari diplomasi adalah negosiasi yang secara luas berarti diskusi yang dirancang untuk mengidentifikasi adanya kepentingan dan area konflik bersama di antara para kedua belah pihak (Evans & Newnhan 1997). Lebih lanjut tujuan negosiasi di antara dua pemerintah atau lebih adalah untuk saling mengubah atau menyokong tujuan dan kebijakan satu sama lain atau untuk mencapai persetujuan mengenai beberapa isu yang diperdebatkan. Akan tetapi negosiasi itu mungkin mempunyai tujuan lain atau efek sampingan. Sejumlah besar komunikasi diplomatik di antara dua atau lebih pemerintah terutama diadakan untuk bertukar pandangan, mengkaji maksud dan berusaha meyakinkan pemerintah negara lain bahwa tindakan – tindakan tertentu seperti menghadiri konferensi atau mengulurkan dukungan diplomatik atas suatu persoalan internasional yang khusus adalah demi kepentingan mereka (Holsti, 1988).

Keberadaan dua negara besar yang ingin menanamkan pengaruhnya di kawasan Asia sangat menguntungkan pemerintah Sri Lanka. Adanya persaingan dalam konteks regional antara China, India dan juga Pakistan untuk menanamkan pengaruh di Samudra Hindia menguntungkan Sri Lanka yang kemudian memperoleh banyak bantuan militer dari ketiga negara ini. Ketika Amerika Serikat menghentikan pemberian bantuan finansial kepada Sri Lanka karena melihat adanya permasalahan HAM di dalam kasus Sri Lanka di tahun 2007. China mengambilalih peran tersebut dan memberikan bantuan yang tidak kecil terhadap Sri Lanka (bantuan berupa peralatan militer dan bantuan keuangan senilai \$1 milyar di tahun 2008).

China menyediakan dukungan yang tidak sederhana bagi Sri Lanka, saat PBB dan negara Barat meminta agar Pemerintah Sri Lanka menghormati Hak Asasi Manusia dan mencegah munculnya korban sipil dalam upaya menundukkan LTTE, pemerintah Sri Lanka merasa hal ini menjadi penghalang untuk menundukkan LTTE. Namun dengan bantuan finansial serta peralatan militer dari China pemerintah Sri Lanka tidak lagi merasa khawatir tidak mendapatkan bantuan militer dari negara – negara Barat terutama Uni Eropa karena adanya substitusi bantuan dari Barat ke China. Di samping itu China juga menjadi negara yang mendukung Sri Lanka di PBB dengan mencegah pengenalan resolusi yang kritis terhadap pemerintah Sri Lanka. Tanpa liputan diplomatik ini, Sri Lanka akan menghadapi situasi yang jauh lebih sulit untuk

mempertahankan ekspansi militer. Hubungan yang berkembang ini telah diterjemahkan ke dalam cakupan diplomatik yang sangat efektif untuk Sri Lanka.

India dan Pakistan juga memberikan bantuan militer dengan jumlah yang tidak sedikit. India telah terlibat dalam Perang Sipil Sri Lanka sejak lama. Presiden Rajapakse berusaha menjaga hubungan baik dengan India, karena India pendukung Internasional Sri Lanka yang paling penting (ICG, 2008). India menyediakan *Fast Attack Craft*, radar militer, peralatan logistik dan jasa, suku cadang, Intelijen bersama dan pelatihan kepada tentara Sri Lanka. Adanya peningkatan dalam kerjasama penggunaan kapal perang diyakini memainkan peran yang penting dalam membatasi *supply* senjata untuk LTTE melalui Tamil Nadu.

4.6 Strategi Sosial - Ekonomi Pemerintah Sri Lanka

Untuk melakukan rekonstruksi wilayah Utara dan Timur pasca konflik, Pemerintah Sri Lanka bekerjasama dengan UNDP melalui *Country Programme Action Plan* menjalankan program transisi untuk mencapai integrasi sosial dan pemulihan ekonomi terutama bagi etnis Tamil di Provinsi Utara dan Timur Sri Lanka. Tujuan dari program ini adalah untuk meningkatkan kesejahteraan dalam bidang sosial dan ekonomi masyarakat yang terkena dampak konflik (UNDP, 2012). Program ini juga bertujuan untuk melakukan perbaikan struktural yang mengarah pada perdamaian serta mengurangi munculnya potensi konflik dan

dilakukan tidak hanya saat perang berlangsung tetapi juga pasca berakhirnya perang.

Program ini kemudian menyoal warga Tamil di wilayah Utara dan Timur yang selain merupakan korban yang terkena dampak langsung dari perang juga merupakan wilayah yang memiliki tingkat kemiskinan paling tinggi di Sri Lanka terutama di Distrik Mullaitivu dengan angka kemiskinan mencapai 29%. Tingkat kemiskinan di wilayah ini mempengaruhi kesejahteraan dari warga yang mendiami wilayah ini, sehingga *Programme Action Plan* diharapkan dapat menjadi cara untuk mengurangi ketimpangan ekonomi dan sosial di dua wilayah yang didiami oleh etnis Tamil ini.

5. KESIMPULAN

Untuk mengakhiri konflik berkepanjangan yang terjadi di antara Pemerintah Sri Lanka dengan Kelompok *Liberation Tigers of Tamil Eelam* (LTTE) telah beberapa kali dilakukan upaya perundingan agar konflik dapat diselesaikan dengan negosiasi. Terhitung sejak 1983 hingga 2009 sudah 5 kali perundingan, operasi pembebasan serta mediasi – mediasi yang melibatkan negara lain dalam upaya mengakhiri konflik namun hal tersebut tetap tidak berhasil dikarenakan LTTE memang memiliki tuntutan untuk memisahkan diri dari Sri Lanka dan membentuk Negara Tamil Merdeka. Hingga akhirnya Pemerintah Sri Lanka mengubah strategi dari upaya perundingan menjadi berkeinginan untuk memusnahkan LTTE.

Penerapan *Grand strategy* akhirnya menjadi upaya yang berhasil untuk mengakhiri

perang dengan membawa kemenangan bagi Pemerintah Sri Lanka. *Grand strategy* diterapkan dengan tujuan untuk mencapai keamanan tertinggi dalam suatu negara dengan mengatur cara – cara yang tidak hanya dilakukan dengan penggunaan militer yang ketat tetapi juga menyertakan instrumen ekonomi, diplomatik, sosial, dan instrumen politik dalam kebijakan nasional di dalamnya. *Grand Strategy* dapat menjadi pilihan bagi pemerintah suatu negara untuk menyelesaikan permasalahan Internasional maupun permasalahan domestik di dalam negara itu sendiri. Ketika menggunakan satu strategi kurang efektif dilakukan dalam mengakhiri permasalahan baik konflik internal maupun eksternal suatu negara. Pemerintah suatu negara dapat menerapkan strategi lainnya untuk mendukung strategi utama yang diadopsi.

Dalam kasus Sri Lanka ketika penerapan operasi militer yang sempit tidak berhasil mengakhiri Perang Sipil Sri Lanka, Pemerintah kemudian mengadopsi *grand strategi* dengan menggabungkan strategi politik, diplomasi, social-ekonomi untuk mendukung strategi militer yang dijalankan dengan tujuan mencapai kemandirian tertinggi bagi negara dengan menundukkan kelompok LTTE. Karena komponen yang dapat dikombinasikan dalam *grand strategy* begitu kompleks dan kaya, sehingga *grand strategy* dapat ditempuh dengan berbagai cara.

Merunut pada kasus Sri Lanka, dalam bidang militer Pemerintah Sri Lanka melakukan berbagai perubahan dengan meningkatkan kualitas pasukan dan persenjataan yang

dimiliki, merubah taktik untuk menghadapi LTTE serta melakukan operasi militer yang lebih terencana untuk menekan LTTE. Begitu pula dalam bidang politik, tawaran kebijakan politik untuk memberikan hak otonomi bagi etnis Tamil di wilayah Utara dan Timur yang dilakukan Pemerintah Sri Lanka pasca perang berhasil memberikan dampak bagi peningkatan dukungan dari etnis Tamil kepada pemerintah Sri Lanka. Dalam bidang diplomasi, dengan melakukan negosiasi yang efektif dengan negara – negara yang ingin menanamkan pengaruhnya di wilayah Asia khususnya Asia Selatan seperti China, India dan Pakistan, Sri Lanka menjadi sangat diuntungkan dengan adanya pemberian bantuan pendanaan, persenjataan serta dukungan internasional di depan dewan keamanan PBB. Secara sosial-ekonomi, seperti yang diketahui bahwa etnis Tamil di wilayah Utara dan Timur Sri Lanka mengalami permasalahan kemiskinan dan menghadapi langsung dampak peperangan, sehingga Pemerintah Sri Lanka bekerjasama dengan UNDP membuat suatu program kesejahteraan di wilayah Utara dan Timur, tujuannya selain untuk merekonstruksi wilayah terjadinya peperangan juga untuk mensejahterakan rakyat secara ekonomi dan secara tidak langsung dapat mencegah kemunculan kembali konflik serupa.

6. DAFTAR PUSTAKA

Aid from China and Take a Pass on Human Rights,” The New York Times. Diakses pada 13 Juni 2017 dari www.nytimes.com.

- com/2008/03/09/weekinreview/09sengupta.html
- Bungin, Burhan. (2007). Penelitian kualitatif komunikasi, ekonomi, kebijakan publik, dan ilmu sosial lainnya. Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Collier, P., & Hoeffler, A. (2002). Greed and grievance in civil war. University of Oxford, Institute of Economics and Statistics, Centre for the Study of African Economies.
- Holsti, K.J. (1988). Politik Internasional Kerangka untuk Analisis. Erlangga
- Kennedy, P. M. (1991). Grand strategies in war and peace. New Haven: Yale University Press.
- Kuperman, A.J. Liberia: How Diplomacy Helped End a 13 Year Civil War. Diakses pada 4 Januari 2017 <http://www.inss.org.il>
- Laksmana E.A & Lee, T. (2011). Civil-Military Relations and Negotiated Settlements in Civil Wars: Explaining the Failure and Success of Post-Suharto Peace Processes in Aceh. Diakses pada 17 April 2017 dari <https://www.academia.edu/2130479/>
- Lunn, J. (2009). War and Peace in Sri Lanka. House of Commons Library. Diakses pada Juni 2017
- Mas'ood, M. (1990). Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi. Jakarta: LP3ES
- Mehta, A. (2010). Sri Lanka's Ethnic Conflict: How Eelam War IV was Won. Centre for Land Warfare Studies (CLAWS), New Delhi.
- Mushtaq, S. (2012). Identity Conflict in Sri Lanka: A Case of Tamil Tigers. International Journal of Humanities and Social Science.
- Perere, S. (1999). The Ethnic Conflict in Sri Lanka: A Historical and Sociopolitical Outline. Diakses pada 10 November 2016 dari <http://siteresources.worldbank.org/INTSRILANKA/Resources/App1.pdf>
- Sugiyono. 2012. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Sukarjaputra, Y.R. (2010). Auman terakhir macan tamil : Perang Sipil Sri Lanka 1976 – 200. Jakarta : Penerbit Buku Kompas
- Zwier, J.L., (1998). Sri Lanka: War Torn Island. Lerner Publication Company, Minnesota, United States.

